

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir – akhir ini topik mengenai Tanggung Jawab Sosial Korporat atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin banyak dibahas di dunia, baik di media cetak dan elektronik, seminar ataupun konferensi. Perusahaan di dunia juga semakin banyak yang mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Semakin maraknya pembahasan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi *praktek Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan perlunya perusahaan memperhatikan kepentingan stakeholders – nya sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan stakeholders demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian terhadap CSR tertuang dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74. Pasal 74 UU PT menentukan bahwa setiap perseroan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Diuraikan pula bahwa TJSL pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi, sebagai contoh : kegiatan sektor pertambangan mineral dan batu bara yang tergolong perusahaan yang berukuran besar sebagai faktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Ekonomi Indonesia masih membutuhkan kegiatan pertambangan untuk

penunjang pertumbuhan," kata Ketua Komisi Tetap Batu Bara dan Panas Bumi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Jeffrey Mulyono karena berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah tidak mungkin melarang kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi yang berukuran besar di sektor itu. Sementara itu, hak masyarakat di daerah yang wilayahnya terkena kegiatan pertambangan mineral serta batubara dikembalikan melalui program *corporate social responsibility* (CSR). "Kalau dana yang selama ini belum kembali ke masyarakat pelan-pelan akan terjawab dengan undang-undang (UU) otonomi daerah dan akan perbaikan dan penghijauan didearah sekitar perusahaan tersebut," ujar dia¹.

Dengan demikian, adanya hal kebijakan pemerintah perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan tergolong perusahaan berukuran besar wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, agar tidak adanya pelanggaran atas kewajiban yang akan menyebabkan perusahaan akan dikenai sanksi.

Kurangnya komitmen pemimpin terhadap lingkungan sosial juga mempengaruhi perusahaan belum maksimal melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*. Sebagai contoh: Penetapan kewajiban *corporate social responsibility* (CSR) harus memperhatikan banyak faktor. Jika hanya ditetapkan pada sektor sumber daya alam, hal tersebut justru menimbulkan penilaian yang politis. Ada kemungkinan, bahaya tersebut muncul bukan dari sumber daya alam (SDA). penetapan kewajiban CSR tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi

¹ Arinto.wibowo@vivanews.com, *RI Masih Butuh Sektor Mineral dan Batu Bara* (Diakses tanggal 1 Maret 2010)

negara. Karena dengan penerapan standar seperti itu, akan memicu perusahaan hanya melakukan CSR sebatas memenuhi peraturan saja².

Dengan demikian, berdasarkan fakta diatas menyatakan bahwa dengan kurangnya komitmen pemimpin terhadap lingkungan sosial juga mempengaruhi perusahaan belum maksimal melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*. Perusahaan hanya sebatas memenuhi peraturan kewajiban atas CSR tanpa adanya komitmen yang tinggi perusahaan tersebut terhadap CSR.

Kondisi perusahaan sedikit banyak juga mempengaruhi kinerja serta luas penyajian laporan tahunan termasuk laporan sukarela perusahaan. Kondisi perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki shareholder yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya. Sebagai contoh: Salah satu pihak yang dinilai banyak menyumbangkan sumbang kasih bagi penyelamatan lingkungan hidup adalah Danone Aqua. Perusahaan air minum mineral yang tergolong dalam perusahaan yang besar ini dinilai telah berkontribusi cukup banyak bagi misi penyelamatan lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia. Danone Aqua selama ini dianggap telah berperan aktif dalam mitigasi perubahan iklim melalui beberapa program seperti: pengurangan emisi CO₂, penghijauan dan konservasi di berbagai lokasi di Indonesia, pengembangan biogas di Subang, Jawa Barat, serta pengembangan

² Candra Setya Santoso, <http://economy.okezone.com/read/2010/06/06/320/340032/kewajiban-csr-jangan-hanya-sebatas-memenuhi-peraturan> (Diakses tanggal 6 Juni 2010)

pertanian organik. Selain itu, Danone Aqua juga dianggap sebagai salah satu pihak industri yang telah mengurangi pemakaian energi secara keseluruhan di semua pabrik AQUA di Indonesia dan menetapkan suatu model pemakaian energi yang lebih baik. Menariknya, Danone Aqua sendiri juga telah sukses memanfaatkan air secara bijak melalui kebijakan pengurangan konsumsi air pada proses produksi di pabrik AQUA di seluruh Indonesia dan program Akses Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan. Faktor lain yang menjadi poin penentu keberhasilan Aqua Danone dalam meraih penghargaan lingkungan hidup 'Indonesia Green Awards 2010' adalah pengembangan keanekaragaman hayati melalui konservasi di berbagai lokasi di Indonesia, salah satunya melalui penanaman mangrove di wilayah Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Dalam menjalankan perusahaan air mineral AQUA di berbagai pabriknya yang tersebar di seluruh Indonesia, Danone Aqua juga menerapkan konsep *GREEN (Global Risk Evaluation for Environment Building)*.³

Selain itu contoh : Batasan produksi rokok golongan III yang maksimal hanya mencapai 300 juta batang per tahun dinilai memberatkan. Kebijakan tersebut dinilai tidak akan banyak memberi ruang kepada pabrikan golongan kecil untuk dapat mengembangkan usahanya. Pernyataan tersebut disampaikan anggota advokasi Persatuan Perusahaan Rokok Kudus, Agus Suparyanto. Menurutnya, perusahaan rokok kecil sulit berkembang seandainya kebijakan pembatasan produksi seperti itu masih tetap diberlakukan. 'Logikanya, kalau rokok yang

³ Freddy Wally, *danone aqua ukuran perusahaan besar raih green award dalam menerapkan csr* http://nasional.news.viva.co.id/news/read/70-danone_aqua_raih_green_award (Diakses tanggal 10 Agustus 2010)

diproduksi terbatas maka pendapatannya pun akan berkurang," imbuhnya. Apalagi, pada 2013 pelaku usaha rokok khususnya golongan III akan merasakan dampak kenaikan tarif cukai. "Harga rokok naik dan produksi dibatasi, tentu akan membuat perusahaan rokok semakin sulit berkembang," ujarnya⁴. Dengan ini perusahaan rokok kecil sulit untuk melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*. Karena karena banyak permasalahan mengenai pembatasan produksi dan tarif bea cukai yang memberatkan perusahaan kecil melakukan CSR belum maksimal.

Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang beragam mempengaruhi perusahaan belum maksimal melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*. Bahwa tipe perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan. Tipe perusahaan yang lebih tinggi (*high – profile*) lebih banyak mengungkapkan kegiatan sosial perusahaan dibandingkan tipe perusahaan yang lebih rendah (*low – profile*). Sementara itu sifat peraturan pemerintah yang diwajibkan dan disertai sanksi bagi pelanggarnya, mengindikasikan baik perusahaan *high – profile* maupun *low – profile* harus melaksanakan peraturan yang berlaku bagi mereka.

Selain faktor diatas, sistem perpajakan kurang tertata dengan baik mempengaruhi perusahaan belum maksimal melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*. Sebagai contoh: Sejak diberlakukannya asas *self assesment* berdasarkan UU KUP 6/1983 yang kemudian diubah dengan UU 28/2007, dimana

4

Anton
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/12/07/137569/Pembatasan-Produksi-dan-Tarif-Cukai-Beratkan-Pabrik-Kecil> (Diakses tanggal 7 Desember 2012)

wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan besaran pajaknya tampaknya tak berjalan dengan baik. Dalam segi lembaga perpajakan juga harus dibenahi, karena banyak permasalahan keluhan masyarakat yang menjadi alasan untuk tidak patuh pajak⁵.

Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa dengan sistem perpajakan yang kurang tertata dengan baik mempengaruhi perusahaan belum maksimal melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*. Karena karena banyak permasalahan keluhan masyarakat yang menjadi alasan untuk tidak patuh pajak sehingga pelaksanaan CSR tidak dapat maksimal dilaksanakan.

Laba perusahaan yang tidak dapat diprediksi juga mempengaruhi perusahaan dalam memaksimalkan pengungkapan *corporate social responsibility* Sebagai contoh : PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menargetkan perolehan laba bersih di 2011 sebesar Rp 184,7 miliar, turun dari laba bersih di 2010 yang mencapai Rp 189,48 miliar. Menurunnya perolehan laba di tahun 2011 ini dikarenakan BUMN konstruksi ini harus membayar bunga bank dari hasil pinjaman yang telah direalisasikan. "Tahun 2011 ini target laba Rp 184 miliar karena kenaikan bunga bank karena kami menjalani proyek sinergi dengan BUMN, sehingga kami harus mendanai itu dari finansial bank," ungkap Direktur Utama ADHI, Kiswodarmawan di sela RDP dengan Komisi VI DPR⁶.

Berdasarkan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Adhi Karya Tbk tidak tepat dalam memprediksi perolehan laba pada tahun berjalan. Dibuktikan

⁵ Widi Agustian <http://economy.okezone.com/read/2010/10/06/20/379659/komwas-pajak-benahi-peraturan-dan-lembaga-perpajakan> (Diakses tanggal 6 Oktober 2010)

⁶ Herdaru Purnomo, <http://finance.detik.com/read/2011/10/10/120411/1740408/6/bunga-bank-naik-adhi-karya-prediksi-laba-2011-turun> (Diakses tanggal 10 Oktober 2011)

dengan PT Adhi Karya Tbk menargetkan perolehan laba tahun 2011 sebesar Rp 184,7 miliar sedangkan akhir tahun mencatat perolehan laba hanya sebesar Rp 184 miliar dikarenakan kenaikan bunga bank karena PT Adhi Karya Tbk sedang menjalani proyek sinergi dengan BUMN, sehingga harus mendanai kenaikan bunga tersebut dari finansial bank. Sehingga perusahaan belum maksimal melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* karena prediksi laba yang kurang tepat sehingga pengungkapan *corporate social responsibility* pun belum dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan CSR dalam laporan tahunannya, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal antara lain manajemen perusahaan, karyawan, kondisi perusahaan, serta pemegang saham selain publik. Faktor eksternal perusahaan adalah pemegang saham publik, masyarakat luas dan lingkungan, pemerintah, serta kondisi ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang berukuran besar sangatlah penting dalam ukuran melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka aktivitas lebih banyak, menyebabkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maka akan semakin tinggi pengungkapannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul “ HUBUNGAN ANTARA UKURAN PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PERUSAHAAN INDUSTRI *GO PUBLIC* DI BURSA EFEK INDONESIA ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui seberapa besar perusahaan belum maksimal melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* antara lain:

1. Kurangnya TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) atas dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
2. Kurangnya komitmen pemimpin terhadap lingkungan sosial
3. Ukuran perusahaan yang beragam
4. Sistem perpajakan kurang tertata dengan baik
5. Laba perusahaan tidak dapat diprediksi

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, ternyata masalah pengungkapan *corporate social responsibility* mempunyai berbagai faktor yang sifatnya luas dan kompleks. Oleh karena itu penelitian membatasi masalah pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan industri go public di Indonesia. Dimana ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total *asset*, sedangkan pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada kategori *corporate social reporting* untuk menghitung *corporate social responsibility disclosure index* (CSRDI) yang dilihat dari laporan tahunan perusahaan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang diteliti adalah sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan

corporate social responsibility pada perusahaan industri *go public* di Bursa Efek Jakarta?”

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai akuntansi sosial pada umumnya dan pelaporan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan–perusahaan publik pada khususnya. Penelitian ini juga merupakan sebuah aplikasi dari teori yang telah didapatkan oleh peneliti dalam perkuliahan.
2. Bagi Almamater, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian–penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.
3. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan maupun investor, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan sehubungan dengan penerapan CSR dalam operasional perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan.